



WELFARE

JURNAL ILMU EKONOMI

VOLUME 1 NOMOR 1 (MEI 2020)

<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare>

ISSN (PRINT)

ISSN (ONLINE)

PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI: HIPOTESIS KEYNES VERSUS TEORI WAGNER

Iis Surgawati

Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia

*iisurgawati@unsil.ac.id

Diterima: Februari 2020. Disetujui: Maret 2020. Dipublikasikan: Mei 2020.

ABSTRACT

The main purpose of this study was to analyze the relationship between government expenditure, especially on human resource development and economic growth, and paradoxically observed between Keynes hypotheses and Wagner theory of West Java economies. The data used are secondary unbalanced panel data from 27 districts / cities for the period of 2010 - 2017. The estimated model used on the entire data is Two Stage Least Square approach, Fixed Effect Model. The results showed that (i) government expenditure on human resource development and urban structure were significantly positive effect, region characteristic and the global financial crisis were significantly negative effect, labor and democratic development has a negative effect as well as the quality of the institution has a positive effect but not significant on economic growth, (ii) economic growth, population and total government expenditure were significantly positive effect, the financial crisis and the quality of institutions have a positive effect as well as the characteristics of the region and the development of democracy have negative effect but not significant on government expenditure on human resources development, (iii) the economy of West Java pattern tends to follow the Wagner theory.

Keywords: *Government Expenditure, Economic Growth, Keynes Hypotheses, Wagner Theory, Two Stage Least Square.*

ABSTRAK

Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis hubungan keterkaitan antara pengeluaran pemerintah, khususnya untuk pembangunan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi serta mengamati paradoks hipotesis Keynes dan teori Wagner pada perekonomian Jawa Barat. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa *unbalance panel data* 27 kabupaten/kota periode 2010 – 2017. Model estimasi yang digunakan adalah *Two Stage Least Square* melalui pendekatan *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sumber daya manusia dan struktur urban berpengaruh positif signifikan, karakteristik daerah dan krisis keuangan global berpengaruh negatif signifikan, tenaga kerja dan perkembangan demokrasi masing-masing berpengaruh negatif serta kualitas institusi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, (ii) Pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah total berpengaruh positif signifikan, krisis keuangan dan kualitas institusi berpengaruh positif serta karakteristik daerah dan perkembangan demokrasi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sumber daya manusia, (iii) Pola perekonomian Jawa Barat cenderung mengikuti teori Wagner.

Kata Kunci: *Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Hipotesis Keynes, Teori Wagner, Two Stage Least Square.*

I. PENDAHULUAN

Kualitas sumber daya manusia adalah faktor yang berperan penting - bahkan lebih penting dari kuantitas - dalam menentukan besar kecilnya potensi pertumbuhan ekonomi suatu negara (Todaro, 2006). Semakin baik kualitas sumber daya manusia suatu negara atau suatu wilayah maka pertumbuhan ekonomi negara atau wilayah tersebut menjadi lebih cepat yaitu melalui peningkatan taraf hidup masyarakat yang meliputi perbaikan tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan umum.

Ilustrasi pada tabel 1 setidaknya memberikan gambaran lebih pentingnya peran kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibanding dengan kuantitasnya dalam hubungannya dengan tingkat keberhasilan pembangunan yang ditunjukkan oleh *Gross Domestic Product* (GDP) perkapita.

Tabel 1. Peringkat IPM dan GDP Perkapita Lima Negara Berpenduduk Terbesar Tahun 2017

Negara	Jumlah Penduduk (ribuan)	Peringkat IPM	GDP Perkapita (PPP Konstan 2011, US\$)
Cina	1.409,5	86	15.309
India	1.339,2	130	6.427
USA	324,5	13	54.225
Indonesia	264,0	116	11.189
Brazil	209,3	79	14.103

Sumber: website <http://www.hdr.undp.org/en/data>

Dari sisi kuantitas Jawa Barat sesungguhnya memiliki potensi yang amat memadai. Menurut catatan BPS hingga tahun 2017 Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 48.037.827 jiwa, di mana lebih dari 73% atau sebanyak 35.353.191 orang diantaranya merupakan penduduk usia kerja. Namun modal pendidikan dan kondisi kesehatan masyarakat Jawa Barat baru dapat menghasilkan angka IPM yang lebih rendah dari angka nasional dengan peringkat yang hampir stagnan di posisi tengah diantara 34 provinsi. Bahkan diantara 7 provinsi di wilayah Jawa – Bali,

Jawa Barat hanya berada di posisi 5 (BPS, 2018).

Tabel 2. Peringkat dan Perbandingan Beberapa Indikator Pembangunan Manusia dan Ketenagakerjaan Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017

Indikator	Jawa Barat	Nasional	Peringkat
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,14	8,10	20
Angka Harapan Hidup (Tahun)	72,47	71,06	6
<i>Purchasing Power Parity</i> (Ribuan Rupiah)	10.285	10.664	17
Indeks Pembangunan Manusia	70,69	70,81	10
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,22	5,55	3
Tingkat Partisipasi Kerja (%)	63,34	66,67	28
<i>Employment Rate</i> (%)	58,13	63,71	31

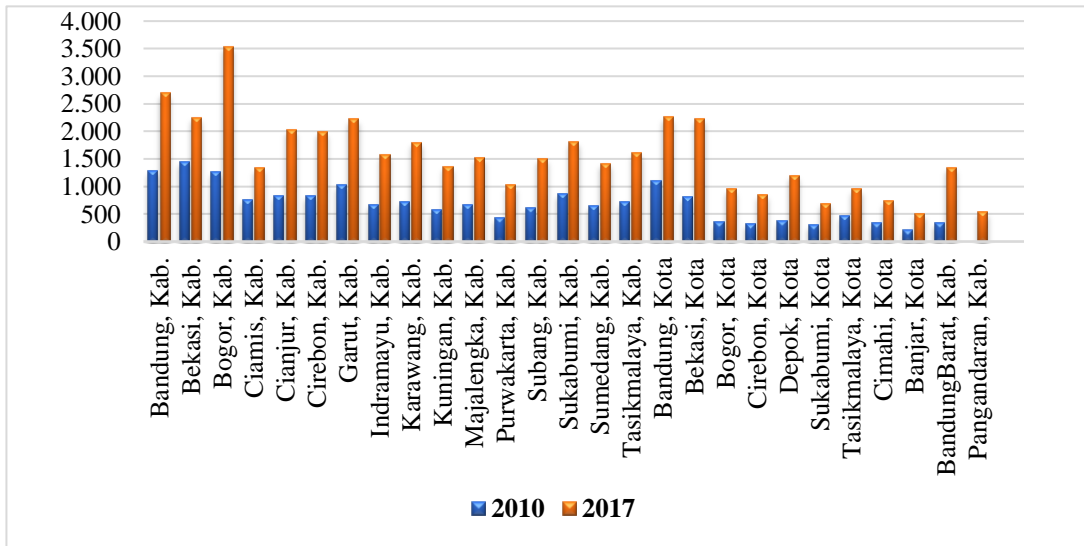
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Konsekuensi dari rendahnya kualitas sumber daya manusia diantaranya adalah buruknya indikator ketenagakerjaan. Meski Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) lebih tinggi, namun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat juga lebih tinggi dari angka nasional sehingga memperburuk angka penyerapan tenaga kerja (*employment rate*).

Upaya untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia dilakukan pemerintah melalui serangkaian program yang secara khusus diarahkan untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Aktivitas pemerintah tersebut nampak dari besarnya pengeluaran pemerintah untuk kedua bidang tersebut yang tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengeluaran pemerintah untuk fungsi

pendidikan dan kesehatan pada 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat secara umum menunjukkan peningkatan dari tahun

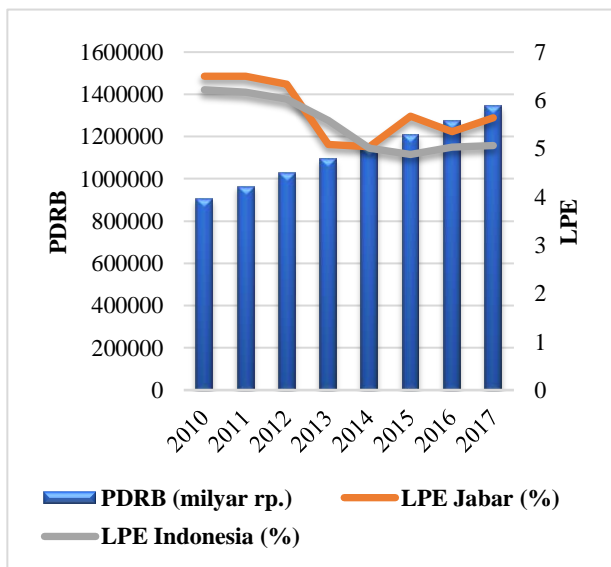
ke tahun. Adapun perkembangan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan dapat dilihat pada gambar 1:



Gambar 1. Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan dan Kesehatan pada 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2010 dan 2017 (Milyar Rupiah)

Sumber: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=316

Meningkatnya pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan pada kabupaten/kota sebagaimana ditunjukkan gambar 1 diharapkan mampu memacu laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang sejak tahun 2010 cenderung menurun setiap tahun serupa dengan pola nasional. Pola tersebut terbentuk berdasarkan dinamika Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat sepanjang periode tersebut (gambar 2).



Gambar 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 serta Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2010 – 2017

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan kebijakan fiskal baik melalui penerimaan pemerintah yang berupa pajak (*tax*) maupun melalui pengeluaran pemerintah (*government expenditure*). Dampak kebijakan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi salah satunya ditandai dengan angka pengganda pengeluaran, yaitu angka yang menunjukkan besarnya kelipatan pertambahan output nasional jika terjadi penambahan pengeluaran investasi atau pengeluaran pemerintah. Angka pengganda itulah yang memberi sinyal adanya dampak kebijakan fiskal (pengeluaran pemerintah) terhadap pertumbuhan ekonomi (Keynes dalam Mankiw, 2010).

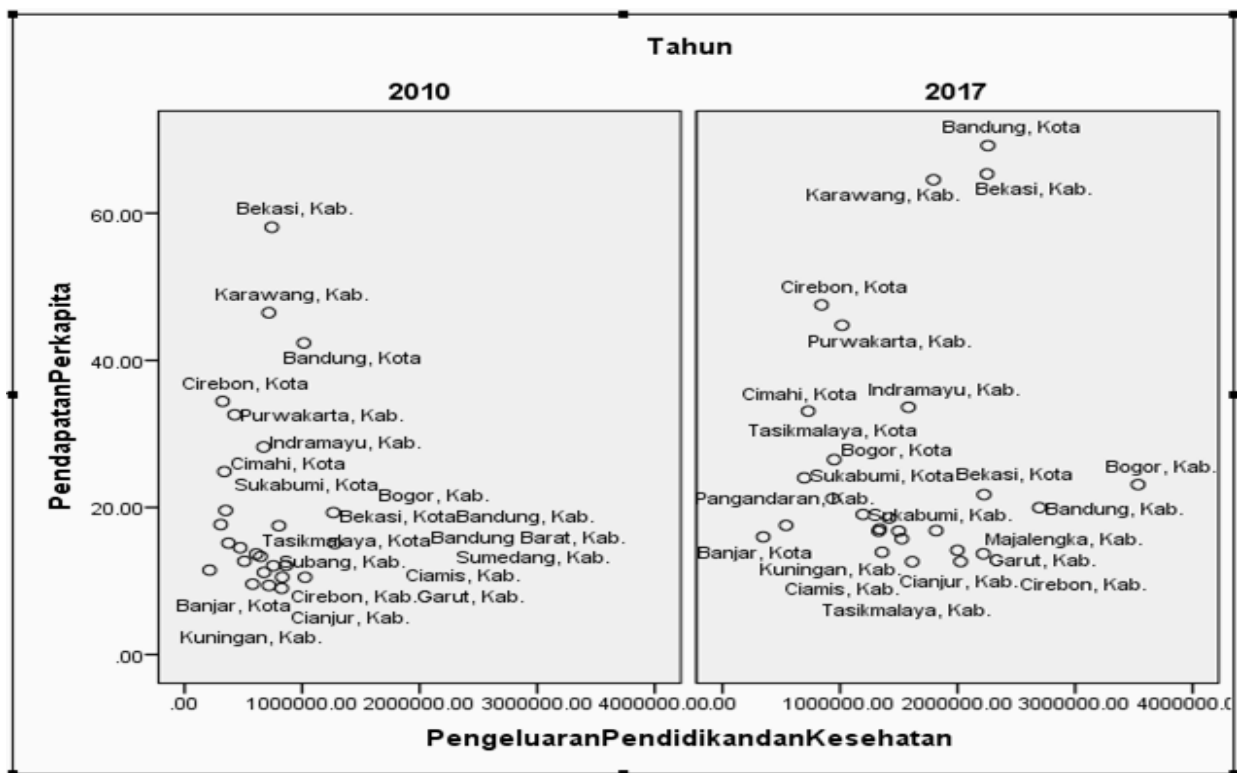
Pada kasus di Nigeria (Dauda, 2011) dan Malaysia (Mohd. Yahya, 2012), pengeluaran pemerintah untuk pendidikan yang mengukur investasi pendidikan yang didukung dengan modal fisik dan tingkat partisipasi angkatan kerja terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Khusus untuk kasus Nigeria, diantara tingkat pendidikan primer, sekunder dan tersier yang diproksi oleh *school enrollment* pada ketiga tingkatan tersebut Adawo (2011) bahkan mendapatkan bahwa pendidikan primer serta modal fisik dan pengeluaran total untuk kesehatan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil ini berbeda dari temuan Akintoye dan Adidu (2008) yang mendapatkan hasil yang agak kontroversial, di mana investasi modal manusia melalui *recurrent expenditure on education* berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan pendapatan perkapita, sedangkan pengaruh timbal balik diantara keduanya adalah sama kuat dan signifikan. Hubungan timbal balik ini nampak juga pada perekonomian Bangladesh melalui riset yang dilakukan Rahman (2011).

Berbeda dengan Keynes, Wagner justru melihat bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah diakibatkan adanya perkembangan sosial dan perkembangan industri yang mendorong peningkatan pendapatan perkapita (Rosen, 2009). Beberapa hasil riset yang mendukung *The Law of Rising Public Expenditure* yang dikemukakan Wagner tersebut diantaranya adalah riset Akanbi dan Schoeman (2010),

Chakrabarty dan Joglekar (2006), Dash dan Raja (2012), Tang (2010) serta Sagarik (2012) yang secara spesifik menemukan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah khususnya pengeluaran pendidikan dan kesehatan diantaranya juga merupakan respon dari meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat.

Dalam hubungannya dengan pengeluaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan, pendapatan perkapita masyarakat yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menunjukkan angka yang bervariasi, baik dari pengamatan antar waktu maupun antar kabupaten/kota itu sendiri. Adapun peta hubungan tersebut cenderung mengalami perubahan dan pergeseran dari tahun 2010 ke tahun 2017, hal tersebut diperlihatkan secara grafis pada gambar 3 berikut ini:



Gambar 3. Peta Hubungan Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan dan Kesehatan dengan Pendapatan Perkapita pada 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2010 dan 2017 (dalam Juta Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Pada gambar 3 nampak secara umum terjadi kecenderungan pergeseran *scatter plot* ke arah positif dari tahun 2010 ke tahun 2017 yang menunjukkan meningkatnya pendapatan perkapita sejalan dengan pertambahan

pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan dengan dengan rata-rata masing-masing 34,66% dan 137,31%. Namun jika diamati secara khusus, terdapat variasi perubahan baik pada pengeluaran pemerintah

untuk bidang pendidikan dan kesehatan maupun pada pendapatan perkapita pada setiap kabupaten/kota.

Perbedaan tingkat keberhasilan pembangunan antar wilayah yakni peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak saja berhubungan dengan besar kecilnya pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan namun juga dengan faktor ekonomi lain seperti karakteristik daerah, dengan faktor demografi, sosial bahkan dengan faktor politik dan kualitas institusi.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis keterkaitan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sumber daya manusia yang diukur oleh pengeluaran di bidang pendidikan dan pengeluaran di bidang kesehatan, dengan pertumbuhan ekonomi yang diukur oleh pendapatan perkapita, serta untuk mengidentifikasi apakah pola perekonomian Jawa Barat lebih mendekati Hipotesis Keynes atau Teori Wagner.

II. METODE PENELITIAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya manusia adalah salah satu faktor kunci bagi keberhasilan pembangunan suatu negara atau suatu wilayah. Dalam kerangka *production centered development* manusia dipandang sebagai input produksi, di lain pihak dalam kerangka *people centered development* manusia dipandang sebagai output yang merupakan sasaran akhir dari keseluruhan aktivitas pembangunan (Tjokrowinoto, 1996 dalam Kuncoro, 2010).

Pentingnya peran modal manusia dalam pembangunan menjadi alasan bagi pemerintah untuk terus berupaya memperbaiki kualitasnya melalui serangkaian kebijakan, khususnya kebijakan fiskal yang berupa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan.

A. Objek Penelitian

Objek penelitian ini secara garis besar mencakup dua variabel pokok yang terkait dengan pembangunan sumber daya manusia yaitu pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pendapatan

perkapita pada 27 kabupaten/kota di Jawa Barat untuk periode tahun 2010 sampai 2017, termasuk Kabupaten Pangandaran yang merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari Babupaten Ciamis dan secara resmi disahkan melalui Undang-Undang No. 21 tahun 2012. Dengan demikian untuk keperluan analisis jumlah unit penelitian sebelum pemekaran (tahun 2010 – 2012) adalah 26 dan setelah pemekaran (tahun 2013 – 2017) menjadi 27 kabupaten/kota. Selain kabupaten Ciamis dan Pangandaran, kabupaten lainnya adalah Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang dan Bekasi, serta kota Bogor Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya dan kota Banjar.

Variabel lain yang menjadi objek penelitian dan memiliki keterkaitan dengan kedua variabel tersebut masing-masing adalah struktur perekonomian daerah yang diproksi oleh *share* sektor industri, tenaga kerja yang diukur dengan *employment rate*, *urban rate* sebagai ukuran struktur urban, jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah total (dinyatakan dalam logaritma natural), *dummy* hasil opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai salah satu ukuran kualitas kelembagaan dan *dummy* perkembangan demokrasi yang ditunjukkan oleh ada/tidaknya penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah secara langsung.

B. Data dan Sumber Data

Keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data panel yang merupakan data gabungan dari data runtut waktu (*time series data*) dengan data silang tempat (*cross section data*), dari tahun 2010 hingga tahun 2017. Terjadinya pemekaran kabupaten Ciamis mengakibatkan struktur data panel menjadi tidak lengkap atau dikenal dengan istilah *unbalanced panel* karena pemekaran sendiri dimulai sejak tahun 2013. Struktur *unbalanced panel* ini menghasilkan 213 pasang observasi yang terdiri dari 78 pasang observasi dari periode sebelum pemekaran

dan 135 pasang observasi dari periode setelah pemekaran.

Keseluruhan data tersebut diperoleh dari publikasi tercetak maupun online yang bersumber dari *Indonesian Database for Policy and Economic Research* (INDO-DAPOER) World Bank, Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di masing-masing kabupaten/kota dan berbagai instansi atau lembaga terkait lainnya.

C. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan pendekatan persamaan simultan (*simultaneous equation*). Dalam model ini pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan dan pendapatan per kapita diperlakukan sebagai variabel endogen sedangkan variabel lain (struktur perekonomian daerah, tenaga kerja, struktur urban, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah total, krisis keuangan, kualitas institusi dan perkembangan demokrasi) diperlakukan sebagai variabel eksogen.

Spesifikasi umum model panel simultan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini berupa persamaan struktural sebagai berikut:

$$LINC_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 LGEH_{it} + \alpha_2 IND_{it} + \alpha_3 EMP_{it} + \alpha_4 URBAN_{it} + \alpha_5 AUD_{it} + \alpha_6 DEM_{it} + \varepsilon_{it1}$$

(Persamaan 1)

$$LGEH_{it} = \gamma_0 + \gamma_1 LINC_{it} + \gamma_2 IND_{it} + \gamma_3 LPOP_{it} + \gamma_4 LTGE_{it} + \gamma_5 AUD_{it} + \gamma_6 DEM_{it} + \varepsilon_{it2}$$

(Persamaan 2)

dimana:

- LINC = logaritma pendapatan per kapita
- LGEH = logaritma pengeluaran pendidikan dan kesehatan
- IND = struktur perekonomian (*share* sektor industri)
- EMP = tenaga kerja (*employment rate*)
- URBAN = struktur urban (*urban rate*)

- LPOP = logaritma jumlah penduduk
- LTGE = logaritma pengeluaran pemerintah total
- AUD = variabel *dummy* kualitas kelembagaan (hasil opini audit) dimana 1 = WTP atau WDP dan 0 = lainnya
- DEM = variabel *dummy* perkembangan demokrasi (penyelenggaraan pemilukada) dimana 1 = ada pemilukada dan 0 = tidak ada pemilukada
- i = kabupaten/kota
- t = tahun

Untuk mengatasi gangguan pada proses estimasi data panel yang berupa gangguan antar waktu dan/atau antar individu, dapat dilakukan dengan dua cara. Untuk menentukan cara mana yang lebih baik digunakan apakah *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM) dapat dilakukan *Hausman Specification Test*.

Analisis data panel pada umumnya memiliki struktur error yang kompleks (Beck dan Kantz, 1995). Jika model dari data panel tersebut diestimasi dengan OLS biasa, meski koefisien estimasinya tak bias tetapi tidak lagi BLUE karena tidak efisien. Untuk mengatasi permasalahan ini dapat digunakan *Feasible Generalized Least Squares* (FGLS) estimation. Namun karena pada penelitian ini jumlah unit time series lebih sedikit dari pada jumlah unit cross section, maka FGLS tidak dapat digunakan (Wibowo, 2003). Sebagai alternatif, Beck dan Katz (1995) memperkenalkan metode *Panel Corrected Standard Error* (PCSE).

Pengujian pra analisis tidak saja dilakukan terhadap struktur data namun juga terhadap model. Pengujian tersebut meliputi pengujian kondisi order dan kondisi rank (*order & rank condition*), pengujian simultanitas, pengujian endogenitas dan pengujian variabel instrumen. Selain itu pengujian ekonometrik berupa uji multikolinieritas, serial korelasi dan heteroskedastis serta pengujian statistik berupa uji kecocokan model dan uji signifikansi parameter tetap dilakukan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian terhadap struktur data panel menghasilkan keputusan bahwa gangguan antar individu memiliki sifat yang berdampak tetap sehingga metode yang lebih tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Sementara hasil pengujian terhadap model persamaan simultan menunjukkan bahwa kedua persamaan *over identified* sehingga estimasi terhadap model dilakukan dengan teknik *Two Stage Least Square* (TSLS). Selanjutnya hasil pengujian simultanitas, endogenitas dan variabel instrumen dapat dipastikan bahwa kedua persamaan dapat diperlakukan sebagai model simultan di mana penempatan variabel eksogen dan endogen sudah tepat serta semua variabel instrumen adalah valid.

Hasil uji multikolinieritas berdasarkan nilai *variance inflation factor* (VIF) menyimpulkan tidak ada masalah multikolinier pada model. Sedangkan dua pengujian asumsi klasik lainnya yaitu serial korelasi dan heteroskedastis memberikan petunjuk adanya pelanggaran terhadap kedua asumsi tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan koreksi dengan *Generalized Least Square* (GLS) melalui teknik *Panel Correction Standard Error* (PCSE).

A. Hasil Estimasi Model

Secara parsial, hasil estimasi model pertama (LINC) menunjukkan terdapat 4 variabel yang signifikan berpengaruh terhadap pendapatan perkapita yaitu masing-masing pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sumber daya manusia (LGEH), karakteristik daerah (IND) dan struktur urban (URBAN) masing-masing pada taraf nyata 1%, sementara tenaga kerja (EMP), kualitas kelembagaan (AUD) dan perkembangan demokrasi (DEM) berpengaruh tidak signifikan.

Hasil estimasi model kedua (LGEH) menunjukkan terdapat 3 variabel yaitu pendapatan perkapita (LINC), jumlah penduduk (LPOP) dan pengeluaran total (LTGE) yang berpengaruh signifikan pada taraf nyata 1%, sedangkan karakteristik daerah, kualitas kelembagaan dan perkembangan demokrasi berpengaruh tidak

signifikan terhadap pengeluaran untuk pembangunan sumber daya manusia. Hasil estimasi kedua model secara ringkas ditampilkan pada tabel 3:

Tabel 3. Hasil Estimasi Kedua Model

Variabel Independen	Variabel Dependen	
	LINC	LGEH
KOSTANTA	12.26784**	- 26.89653**
LGEH	0.119808**	
LINC		1.100346**
IND	- 0.009084**	- 0.007423*
EMP	- 0.00110*	
URBAN	0.006433**	
LPOP		1.190603**
LTGE		0.727309**
AUD	0.001880*	0.061760*
DEM	- 0.001696*	- 0.010636*
R-squared	0.994583	0.971227
F-statistic	673.0864	143.2387
Prob.(F-statistic)	0.00000	0.000000

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

Keterangan: *) Tidak Signifikan

***) Signifikan pada nilai kritis =1%

Berdasarkan hasil estimasi juga dapat dilihat bahwa semua model memiliki nilai *F-statistic* yang sangat tinggi, yang berarti bahwa semua variabel penjelas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel responnya. Sementara itu berdasarkan hasil uji t dapat dilihat bahwa sebagian besar variabel penjelas berpengaruh signifikan dengan tanda yang sesuai meskipun ada beberapa yang tidak sesuai dengan hipotesis yang ditetapkan.

B. Pembahasan

1. Model Pertumbuhan Ekonomi

Dengan membandingkan nilai *fixed effect* (*cross*) dengan nilai intersep pada hasil estimasi model pertama diperoleh informasi bahwa hanya 10 dari 27 kabupaten/kota yang mampu menghasilkan pendapatan perkapita di atas rata-rata.

Hubungan positif yang signifikan antara pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sumber daya manusia dengan pertumbuhan ekonomi memberi arti bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan telah mampu meningkatkan

pendapatan perkapita masyarakat meskipun inelastis. Temuan ini sesuai dengan hasil riset Dauda (2010) dan Hussin (2011) di mana selain komposisi dan tingkat efisiensi dari pengeluaran publik, faktor yang sangat menentukan bagi pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah jenis pengeluaran atau jenis belanja publik itu sendiri. Temuan penelitian menghasilkan justifikasi bahwa jenis pengeluaran pemerintah (diantaranya pengeluaran pendidikan dan kesehatan) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitannya dengan hipotesis yang dikemukakan Keynes, penelitian ini tidak hanya memperkuat tetapi sekaligus merekomendasikan bahwa penambahan pengeluaran investasi (termasuk untuk fungsi pendidikan dan kesehatan) dapat menstimulasi aktivitas perekonomian sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Walaupun hingga saat ini sektor industri merupakan sektor yang dominan, akan tetapi kontribusinya cenderung menurun setiap tahun. Jika tahun 2010 sektor industri menyumbang 45,01% terhadap PDRB Jawa Barat maka pada tahun 2017 sumbangan sektor ini menjadi hanya 41,39%. Salah satu penyebabnya adalah kontribusi sektor pertanian di daerah pedesaan yang masih mengimbangi sektor industri sedangkan di perkotaan sektor perdagangan sudah mulai menggeser sektor industri akibat dorongan sektor informal yang menjadi pilihan para urban yang tidak memiliki bekal keterampilan yang memadai untuk bersaing di pasar kerja industri. Meski demikian pilihan sektor informal di perkotaan bagi para urban lebih menguntungkan. Indikasi ini nampak dari hubungan positif *urban rate* dengan pendapatan perkapita.

2. Model Pengeluaran Pemerintah untuk Pembangunan Sumber Daya Manusia

Dengan membandingkan nilai *fixed effect* (*cross*) dengan nilai intersep pada hasil estimasi model kedua diperoleh informasi bahwa 16 dari 27 kabupaten/kota dengan pengeluaran pendidikan dan kesehatan di atas rata-rata.

Berdasarkan ringkasan hasil estimasi nampak bahwa estimasi model yang kedua ini menghasilkan temuan awal bahwa koefisien variabel pertumbuhan ekonomi (pendapatan perkapita) mengindikasikan bahwa pemerintah (daerah) merespon peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dengan meningkatkan pengeluaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan.

Kebutuhan masyarakat akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan perkapita sehingga untuk meresponnya pemerintah perlu menambah fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperbesar modal melalui peningkatan pengeluarannya di kedua bidang tersebut meningkat.

Corak agraris pada umumnya nampak di daerah pedesaan dengan wilayah yang lebih luas berpenduduk lebih banyak terbukti meningkatkan pengeluaran pendidikan dan kesehatan. Meski pengeluaran pendidikan lebih diarahkan pada kelompok penduduk usia sekolah (Chakrabarti dan Joglekar, 2006) namun program-program kesehatan yang dirancang pemerintah Indonesia saat ini seperti Jamkesmas dan semacamnya diarahkan untuk semua kelompok penduduk.

Pasca diberlakukannya Undang-Undang No. 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional, pengeluaran pendidikan ditetapkan sebagai persentase dari pengeluaran pemerintah (daerah) total sebagaimana yang tercantum di dalam APBN (APBD) yang secara nominal diartikan bahwa apabila pengeluaran pemerintah meningkat tentunya pengeluaran pendidikan pun akan meningkat. Hanya saja dari nilai koefisien yang diperoleh yang inelastis menunjukkan bahwa pemerintah masih kurang responsif terhadap bidang pendidikan dan kesehatan dari pada respon terhadap bidang lainnya.

3. Hipotesis Keynes versus Teori Wagner

Hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi seperti yang dikemukakan Wagner dan Keynes, menjadi salah satu alasan untuk mengidentifikasi teori mana yang dominan terjadi di Jawa Barat, yaitu dengan membandingkan nilai koefisien pertumbuhan ekonomi pada model

pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sumber daya manusia dengan koefisien pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sumber daya manusia pada model pertumbuhan ekonomi. Jika diamati kedua koefisien ini merupakan elastisitas keduanya pada masing-masing model.

Dari ringkasan hasil estimasi nampak bahwa pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sumber daya manusia lebih responsif terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi dibanding respon pertumbuhan ekonomi akibat perubahan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sumber daya manusia. Koefisien pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sumber daya manusia pada model pertumbuhan ekonomi mengandung arti bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi lebih kecil dari peningkatan pengeluaran pendidikan dan kesehatan (inelastis).

Sedangkan koefisien pertumbuhan ekonomi pada model pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sumber daya manusia mengandung arti bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sumber daya manusia lebih besar dari kenaikan pertumbuhan ekonomi (elastis). Hasil penelitian ini terbukti memberikan penguatan pada teori Wagner di mana perubahan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sumber daya manusia merupakan dampak dari perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan pendapatan perkapitanya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh beberapa simpulan yaitu:

1. Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sumber daya manusia, karakteristik daerah, struktur urban serta krisis ekonomi berpengaruh signifikan, sementara variabel tenaga kerja, kualitas kelembagaan dan perkembangan demokrasi berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan pengeluaran total berpengaruh signifikan, sedangkan karakteristik daerah,

krisis keuangan, kualitas kelembagaan dan perkembangan demokrasi berpengaruh tidak signifikan terhadap pengeluaran pendidikan dan kesehatan.

3. Pola perekonomian Provinsi Jawa Barat cenderung mengikuti teori Wagner.

V. SARAN/REKOMENDASI

Berdasarkan hasil yang diperoleh maka untuk meningkatkan pendapatan masyarakat hendaknya:

1. Tidak terlalu mengandalkan sektor industri tetapi sudah harus memberi kesempatan pada sektor jasa dan perdagangan untuk lebih berkembang.
2. Meningkatkan layanan publik berupa layanan pendidikan kesehatan melalui penambahan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan.
3. Oleh karena hasil opini audit hanya memeriksa aspek keuangan maka dalam hubungannya dengan kesejahteraan, aspek kinerja hendaknya diprioritaskan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Universitas Siliwangi atas hibah penelitian yang telah diberikan, semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengembangan keilmuan.

REFERENSI

- Abu Tayeh, Sultan N. & Mairna H. Mustafa. (2011). "The Determinant of Public Expenditure in Jordan". *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 2 No. 8, May, 45 – 49
- Adawo, M. A. (2011). "Has education (human capital) Contributed to The Economic Growth of Nigeria?". *Journal of Economics and International Finance*, 3 (1): 46 – 58
- Akanbi, Olusegun A. & Nick J. Schoeman. (2010). "The Determinant of Public Expenditure and Expenditure on Education in Particular in A Selection of African Countries". *Departement of Economics University of Pretoria*
- Akintoye, Ishola Rufus & Adidu, Felixa. (2008). "Optimizing National Growth Through Human Resources

- Investments”. *European Journal of Scientific Research*, Vol. 22 No. 3, pp. 433 – 443
- Badan Pusat Statistik. (2015). “70 tahun Indonesia Merdeka”, Jakarta, Indonesia
- Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia, Beberapa terbitan. (2002 – 2014), Jakarta, Indonesia
- Beck, Nathaniel and Jonathan N. Katz. (1995). “What to Do (and Not to Do) with Time-Series Cross-Section Data,” *American Political Science Review*, 89(3), pp. 634-647
- Boonyamanond, Sawarai. (2007). “Can Equality and Growth Be Simultaneously Achieved?”, *Chulalongkorn Journal of Economics* 19(2): 135 – 160
- Dash, Bharatee Bhusana and Angara V. Raja. (2012). “Political Determinants of Public Expenditure: A Study of the Indian States”, Working Paper no. 2012 – 101 of National Institute of Public Finance and Policy, New Delhi
- Dauda, Risikat Olayadin S. (2010). “Investment in Education and Economic Growth in Nigeria: An Empirical Evidence”, *International Research Journal of Finance and Economics*, 55, 158 – 169
- Gujarati, D., N. (2004). *Basic Econometrics*, 4th Edition, Mc Graw Hill, New York.
- Hussin, Mohd. Yahya, Fidlizan Muhammad, Mohd Fauzi Abu and Azila Abdul Razak. (2012). “Education Expenditure and Economic Growth: A Causal Analysis for Malaysia”, *Journal of Economics and Sustainable Development* ISSN 2222-1700 (Paper) ISSN 2222-2855 (Online) Vol. 3, No. 7, 2012
- Kuncoro, Mudrajat. (2010). *Masalah, Kebijakan dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Erlangga, Jakarta.
- Mankiw, N. Gregory. (2010). *Macroeconomics*, 7th edition, Worth Publisher
- Musgrave, Richard, A. & Peggy B. Musgrave. (1984). *Public Finance in Theory and Practice*, 5th ed., International Edition, Singapore, Mc. Graw-Hill Book Co.
- Odit, M., M. and K. Dookhan. (2010). “The Impact of Education on Economic Growth – The Case of Mauritius”, IABR & ITLC Conference Proceeding, Orlando USA
- Oluwatobi, Stephen O. (2011). *Government Expenditure on Human Capital Development: Implication for Economic Growth in Nigeria*. *Journal of Sustainable Development*, Vol. 4 No. 3 June 2011
- Rahman, Mostafizur, Md. (2011). “Causal Relationship among Education Expenditure, Health Expenditure and GDP: A Case Study for Bangladesh”, *International Journal of Economics and Finance*. Vol. 3 No. 3
- Romer, D. (2006). *Advanced Macroeconomics*, University of California Berkeley
- Rosen, Harvey S. and Ted Gayer. (2009). *Public Finance*, 9nd Edition, Richar D. Irwin Inc., Singapore
- Safdari, Mehdi and M. Shakiki and Z. Sheidaee. (2010). “How Does Human Capital Affect on Growth in Different Economies?”, *Journal of Social Sciences*, 6 (3): 416 – 423
- Sagarik, Danuvas. (2012). “The Analysis of the Determinant of Education Expenditure in Thailand”, Dissertation, School of Public Administration National Institute of Development Administration, Thailand
- Sitepu, Rasidin K. dan Bonar M. Sinaga. (2004). “Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia: Pendekatan Model Computable General Equilibrium. <http://ejournal.unud.ac.id/?module=detailpenelitian&idf=7idj=48&idv=18>
- Tang, Chor Foon (2010). “The Determinant of Health Expenditure in Malaysia: A Time Series Analysis”, Munich Personal RePEc Archive
- Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. (2006). “Economic Development”, Pearson Education Limited, United Kingdom